



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HARTONO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 757799

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **530.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 95 m2/95 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 126.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 95 m2/95 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 126.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/110 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 131.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 919 m2/919 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 61.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 840 m2/840 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 86.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **101.700.000**

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOPY Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.400.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
5. MOTOR, HONDA CB Tahun 1974, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **12.500.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	7.060.719
F. HARTA LAINNYA	Rp.	35.887.889
Sub Total	Rp.	687.148.608
III. HUTANG	Rp.	157.600.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	529.548.608

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.